
Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi Pada Kota Mojokerto)

Avinda Goldea Rahmasari, Eni Wuryani
Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya
Jl. Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah berdasarkan perspektif kinerja keuangan Kota Mojokerto dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan terhadap Laporan Realisasi Anggaran Kota Mojokerto tahun anggaran 2014-2016 yang dilaksanakan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kota Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif melalui perhitungan: (1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (2) Rasio Derajat Desentralisasi, (3) Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah, (4) Rasio Keserasian Belanja Daerah, dan (5) Rasio Pengelolaan Belanja. Hasil perhitungan dan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto menunjukkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah dapat dikategorikan sangat rendah dan termasuk pada pola hubungan instruktif. Pemerintah Daerah Kota Mojokerto masih kurang mampu berpartisipasi dalam menjalankan desentralisasi dengan rasio keuangan daerah yang sudah efektif namun belum efisien. Keserasian belanja daerah masih belum seimbang dibuktikan dengan aktivitas belanja yang cenderung digunakan untuk belanja operasi dibandingkan belanja modal, sehingga pengelolaan belanja Kota Mojokerto termasuk defisit.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah; Analisis Rasio Keuangan

Analysis Of District Government Performances Based On The Perspective Financial Performances (Study On Mojokerto City)

ABSTRACT

This research purposes to knowing the district government performances based on the perspective of financial performances of Mojokerto city using analysis of Financial ratio toward report of estimate realization Mojokerto city on 2014-2016. This research uses quantitative-descriptive. This research uses sample from income, organizer and asset corporation of Mojokerto city. Technique of data collection uses interview, documentation, and library study. Technique of data analysis uses quantitative-descriptive with: 1) Ratio of independent financial district 2) Ratio of decentralization degree 3) Ratio of effectivity and efficiency financial district 4) Ratio of Expenditure accord district 5) Ratio of expenditure organizer

Based on the accounting result and work analysis financial performances of district government Mojokerto city, in conclusion that the Independent of financial district can be categorized very low and includes on the instructive relation. District government still depend on the financial helping from province or state government. The level of decentralization degree still incapable. Effectivity of financial district is very effective but less efficient. the calculation from Mojokerto city district government shows that there is imbalance between expenditure. It is proved by the expenditure activity of district government mojokerto city tend to operation expenditure than modal expenditure. The organizer Mojokerto city includes defisit.

Keywords: *Accountability; Performances of Financial District Government; Analysis of Financial Ratio.*

PENDAHULUAN

Kemajuan segala bidang dalam era reformasi termasuk pemerintahan, mendorong pemerintah untuk meningkatkan kinerja lebih efektif dan efisien pada setiap periode kerja. Tangkilisan (2005:70) menjelaskan bahwa pemerintah pusat dihadapi berbagai tantangan dan permasalahan dalam menjalankan pembagian wewenang dan tugas pokok mengenai kegiatan pemerintahan maupun urusan finansial antara

pemerintah pusat dan daerah. Tata kelola yang baik dalam suatu organisasi meliputi tiga aspek, yaitu: transparan, akuntabilitas, dan keadilan. Akuntabilitas adalah kemampuan dan kesediaan seseorang atau organisasi untuk mengklarifikasi penggunaan apa yang diterimanya adalah pemangku kepentingan (Randa & Tangke, 2015). Desakan masyarakat terhadap tercapainya pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta keterbukaan informasi dan transparansi penggunaan dana daerah semakin tinggi. Dalam mewujudkan tuntutan tersebut, pemerintah merubah tatanan lembaga publik dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemberlakuan undang-undang memudahkan daerah dalam menggali berbagai peluang dari sumber dan potensi daerah untuk meningkatkan kinerja keuangan dalam melaksanakan otonomi daerah. Implementasi otonomi daerah yang jelas dan bertanggungjawab harus ditunjang dengan ketersediaan dana yang memadai untuk membiayai pembangunan (Rachim, 2015:47). Penggunaan dana yang diperoleh dalam suatu organisasi, baik sektor publik atau swasta memerlukan pengukuran agar tidak terjadi keborosan ataupun penyelewengan dana dari pihak-pihak tertentu.

Jumingan (2014:239) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja memiliki dua tujuan, yaitu: untuk melihat sejauh mana pencapaian tata kelola keuangan dan untuk memahami kemampuan dalam mengefisienkan semua aset. Kinerja keuangan merupakan salah satu bentuk pengukuran yang bisa dimanfaatkan untuk melihat kompetensi suatu organisasi sektor publik termasuk pemerintah dalam menjalankan otonomi daerah. Analisis rasio keuangan menggambarkan suatu tolak ukur atau sarana dalam mengevaluasi prestasi pemerintah daerah dalam mengatur keuangan daerahnya. Beberapa hasil analisis rasio keuangan menurut Halim (2008:230) tersebut dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemandirian daerah, efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, tingkat aktivitas dalam melakukan belanja operasi dan belanja modal daerah, serta menilai kemampuan keuangan daerah dalam mengambil pinjaman.

Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang turut menyelenggarakan otonomi daerah dan meraih penghargaan Kota berkinerja tertinggi nasional pada peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXI (Sumber: Kemendagri.go.id). Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah dapat ditinjau dari strategi pemerintah daerah dalam mengatur administrasi, menggali potensi daerah, menyusun, mengelola, serta melaporkan penggunaan keuangan. Selain itu, besarnya kontribusi masyarakat dalam melunasi pajak dan retribusi yang menjadi penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) turut mempengaruhi kinerja keuangan daerah. Peningkatan PAD dapat mengurangi ketergantungan pada sumbangan Pemerintah Pusat/Provinsi sehingga Pemerintah Daerah cukup berperan dalam menanggung sendiri berbagai aktivitas pemerintahan maupun pembangunan infrastruktur.

Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto merupakan badan yang mengelola keuangan daerah, khususnya dalam pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh daerah, serta melakukan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan berlakunya otonomi daerah. Adanya review berkala serta penerapan *reward* dan *punishment* bertujuan untuk mengurangi keterlambatan penyampaian laporan keuangan ini dinilai sangat efektif dalam meninjau pelaporan keuangan (Sumber: surabaya.bpk.go.id). Pemerintah melakukan pembaruan alokasi dana dan kebijakan dengan harapan dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah lebih transparan, akuntabel, serta komprehensif yang menggambarkan bentuk realisasi kinerja dari pihak yang mengelola keuangan daerah.

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto menunjukkan adanya beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto. Adapun berbagai permasalahan mengenai keuangan daerah tersebut antara lain: (1) besarnya bantuan dari pemerintah pusat menunjukkan ketergantungan pemerintah daerah yang masih tinggi, (2) kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan total penerimaan daerah menunjukkan kemampuan daerah untuk

mengeksplorasi daya sumber Pendapatan Asli Daerah masih rendah, serta (3) Inefisiensi pemerintah daerah dalam melakukan belanja daerah.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Mojokerto jika dilihat dari rasio kemandirian; rasio derajat desentralisasi; rasio efektivitas dan rasio efisiensi; rasio keserasian belanja; serta rasio pengelolaan belanja. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Perspektif Kinerja Keuangan (Studi pada Kota Mojokerto).

KAJIAN PUSTAKA

Akuntabilitas

Manajemen pemerintahan yang baik (*good government governance*) menuntut pemerintah daerah memiliki prinsip dalam mengelola segala kegiatan pemerintah dibidang politik, sosial, dan ekonomi suatu daerah. Prinsip yang harus dimiliki pemerintah daerah salah satunya adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu sistem yang perencanaan, pelaksanaan, serta hasil akhir dari berbagai kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat harus dijelaskan, dipertanggungjawabkan dievaluasi, dan dibenarkan jika diperlukan sesuai tujuan utamanya yaitu transparansi (Agwor & Akani, 2017). Lembaga sektor publik khususnya pemerintah, bertanggungjawab penuh atas segala kegiatan yang dilakukan dan diharapkan mampu mengevaluasi kinerjanya untuk mengetahui seberapa jauh hasil pencapaian pada pelayanan publik serta merencanakan strategi untuk meraih semua itu. Dubnick & Frederickson (2011:246) memaparkan bahwa penerapan akuntabilitas sebagai jawaban atas kinerja organisasi dalam suatu periode kerja.

Kinerja dan Pengukuran Kinerja

Kinerja menggambarkan suatu hal yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan. Menurut Fahmi (2012:2) kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dijadikan tolak ukur perusahaan dalam menjalankan pengelolaan keuangan secara baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sumber daya yang diperoleh merupakan hasil kelola pihak manajemen mencapai kinerja keuangan dalam mengelola dan menyusun pendapatan dan belanja berdasarkan basis akrual dengan beberapa indikator (Darise, 2008:51). Tingkat pencapaian pemerintah ditunjukkan dari sisi perencanaan dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memanfaatkan indikator keuangan dan pengukuran kinerja yang telah ditetapkan dalam satu periode anggaran. Menurut Bastian (2006:275) mendefinisikan bahwa pengukuran kinerja sebagai metode perhitungan pencapaian tujuan dari suatu aktifitas melalui hasil yang ditampilkan. Salah satu tujuan dilakukannya pengukuran kinerja yaitu sebagai alat dalam mengendalikan suatu organisasi dengan ditetapkannya *reward* dan *punishment system*.

Analisis Rasio Keuangan

Analisis rasio keuangan adalah kegiatan penilaian keuangan dengan membuat perbandingan angka- angka tiap pos yang tertera pada laporan keuangan. Banyaknya tuntutan *principle* mengenai penggunaan laporan keuangan secara akuntabilitas dan transparansi membuat setiap instansi perlu untuk melakukan analisis rasio dalam menilai sejauh mana kinerja perusahaan dalam mengelola keuangan. Menurut Rangkuti (1997:69) Analisis rasio keuangan adalah sebuah instrumen untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan perusahaan secara cepat.

Kinerja keuangan dalam berbagai organisasi sektor publik khususnya pemerintahan, dapat diukur berdasarkan laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan daerah untuk menghitung kemampuan suatu daerah. Beberapa rasio tersebut dipaparkan oleh Halim (2008:232) yang meliputi:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Rasio kemandirian keuangan daerah memaparkan sejauh mana suatu daerah mampu untuk mendanai sendiri segala kegiatan pemerintahan, peningkatan infrastruktur, dan pengembangan pelayanan pada

masyarakat. Rasio Kemandirian menunjukkan tingginya tingkat kesadaran dan kontribusi masyarakat dalam membantu meningkatkan sarana prasarana melalui tindakan membayar pajak dan retribusi daerah yang termasuk dalam meningkatkan faktor utama dalam PAD. Perhitungan yang digunakan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2008:232):

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi dan Pinjaman}}$$

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi memaparkan besarnya pertanggungjawaban pemerintah daerah pada pemerintah pusat/provinsi dalam menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melaksanakan pengembangan daerah. Semakin besar partisipasi PAD maka semakin besar pula kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Semakin besar partisipasi PAD, maka semakin besar juga kapabilitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Untuk mengetahui tingkat derajat desentralisasi digunakan pengukuran sebagai berikut (Tangkilisan, 2005:77):

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam mengumpulkan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan yang ditargetkan dalam perencanaan sebelumnya. Rasio efektivitas dihitung menggunakan pengukuran sebagai berikut (Halim, 2008:234):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisien dari berlangsungnya suatu kegiatan atau program pemerintah. Rasio efisiensi dapat diukur menggunakan persamaan berikut (Halim, 2008:234):

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total realisasi belanja daerah}}{\text{Total realisasi pendapatan daerah}} \times 100\%$$

4. Rasio Keserasian Belanja Daerah (Rasio Aktivitas)

Rasio keserasian belanja daerah menunjukkan sikap pemerintah daerah dalam mengutamakan pendistribusian dana pada pembelanjaan daerah secara optimal. Belanja daerah dipisahkan dalam dua kegiatan, yaitu belanja operasi dan belanja modal dengan perhitungan rasio sebagai berikut (Halim, 2008):

a) Rasio Belanja Operasi

Rasio belanja operasi menampilkan informasi pada pengguna laporan untuk mengetahui besarnya alokasi belanja yang didistribusikan untuk belanja operasi. Belanja operasi merupakan belanja yang bersifat jangka pendek yang kegunaannya habis dikonsumsi dalam satu periode anggaran yang bersifat rutin atau berulang. Untuk mengetahui rasio belanja operasi digunakan pengukuran sebagai berikut (Mahmudi, 2010:164-165):

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

b) Rasio Belanja Modal

Rasio belanja modal menampilkan informasi pada pengguna laporan untuk memahami besarnya alokasi belanja yang didistribusikan untuk pendanaan dalam wujud belanja modal pada periode tahun anggaran berkaitan. Belanja modal adalah belanja yang bersifat jangka menengah dan panjang yang juga bersifat rutin. Besarnya skala belanja modal dengan belanja daerah antara 5-20% (Mahmudi, 2010:164). Untuk mengetahui rasio belanja modal digunakan pengukuran sebagai berikut (Mahmudi, 2010:164-165):

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

5. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menggambarkan kapabilitas pemerintah daerah dalam mengendalikan kegiatan belanja agar tidak melampaui jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah yang juga mencerminkan adanya *surplus* atau *defisit* suatu anggaran. *Surplus* atau *defisit* yaitu selisih besar-kecilnya penerimaan dan pengeluaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan. Untuk mengetahui rasio pengelolaan belanja terhadap APBD digunakan pengukuran sebagai berikut (Fidelius, 2013):

$$\text{Rasio Pengelolaan Belanja} = \frac{\text{Total Pendapatan}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kota Mojokerto berdasarkan perspektif kinerja keuangan dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara kepada pihak terkait pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto yang menangani penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto. Data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tahun anggaran 2014-2016. Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Tahap-tahap dalam melakukan analisis data antara lain : a) Membuat tabel perkembangan APBD dari data yang telah dikumpulkan berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada tahun 2014-2016; b) Mengidentifikasi akun-akun terkait pada masing-masing perhitungan rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, rasio efektivitas dan efisiensi keuangan daerah, rasio keserasian belanja daerah, dan rasio pengelolaan belanja; c) Membuat perbandingan antara tiap akun sesuai perhitungan rasio yang ingin dihitung; d) Menarik kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Kota Mojokerto berdasarkan perspektif kinerja keuangan yaitu berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014-2016. Beberapa komponen utama dalam Laporan Realisasi APBD yaitu: pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Akun yang termasuk dalam pos pendapatan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Pos belanja mencakup beberapa akun, antara lain: belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Hal-hal tersebut akan digunakan untuk menghitung rasio kinerja pengelolaan keuangan sebagai berikut :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kesanggupan pemerintah daerah mendanai segala bentuk aktivitas pemerintahan serta keterikatan pendanaan pemerintah daerah terhadap sumber dana dari luar, khususnya pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini juga menggambarkan besarnya ketergantungan pemerintah daerah pada sumbangan dana dari pemerintah pusat/provinsi. Berikut ini merupakan perkembangan rasio kemandirian keuangan daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2016:

Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Penerimaan Asli Daerah (PAD)	Pendapatan Transfer	RKKD	Pola Hubungan
2014	Rp105.179.719.367	Rp580.809.016.051	18,11	Instruktif
2015	Rp129.258.132.763	Rp571.750.243.709	22,61	Instruktif
2016	Rp152.462.202.064	Rp652.965.468.763	23,35	Instruktif

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 (Data Diolah)

Berdasarkan data yang telah ditampilkan dalam Tabel 1, Rasio Kemandirian Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 mengalami kenaikan setiap tahunnya. Namun, adanya peningkatan tersebut masih menandakan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tidak mampu mandiri dengan hasil perolehan rasio dibawah $\leq 25\%$. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam perolehan ini, bahwa tingkat kemandirian dan pola hubungan yang telah dijelaskan oleh Halim (2010) menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah Kota Mojokerto dinilai tidak mampu mandiri dengan kemampuan keuangan daerah yang rendah sekali, dan termasuk dalam kelompok pola hubungan Instruktif yang nilainya $\leq 25\%$. Pola hubungan Instruktif mencerminkan bahwa peran pemerintah pusat masih sangat menonjol dari pada kemandirian pemerintah daerah, sehingga daerah dinilai tidak sanggup menjalankan otonomi daerah.

2. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi menggambarkan tingkat kewenangan dan tanggung jawab yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan desentralisasi. Berikut ini merupakan perkembangan rasio derajat desentralisasi Kota Mojokerto Tahun 2014-2016:

Tabel 2. Rasio Derajat Desentralisasi Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Penerimaan Asli Daerah (PAD)	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi
2014	Rp105.179.719.367	Rp689.461.578.822	15,26
2015	Rp129.258.132.763	Rp717.544.079.472	18,01
2016	Rp152.462.202.064	Rp806.772.000.827	18,90

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 (Data Diolah)

Berdasarkan data yang telah ditampilkan dalam Tabel 2, Rasio Derajat Desentralisasi Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, adanya peningkatan tersebut masih menandakan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto kurang mampu

berpartisipasi dalam menjalankan desentralisasi dengan hasil titik pencapaian 10,01% - 20,00%. Artinya, peran Pendapatan Asli Daerah masih sangat rendah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

Penyelenggaraan desentralisasi dapat berjalan baik apabila pemerintah daerah dapat mengatur sumber-sumber atau potensi daerah dalam mendanai berbagai kegiatan pemerintahan itu sendiri. Tabel 2 menjelaskan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto masih rendah karena kurang mampu mengoptimalkan potensi daerah yang ada untuk turut serta berpartisipasi meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur daerah.

3. Rasio Efektivitas dan Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menunjukkan kapabilitas pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah dianggarkan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kinerja pemerintah daerah dinilai baik apabila dalam menjalankan kegiatan atau program kerja, realisasi penerimaannya semakin besar dengan pencapaian rasio minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Berikut ini merupakan perkembangan rasio efektivitas keuangan daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2016:

Tabel 3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas
2014	Rp105.179.719.367	Rp82.387.572.450	127,66
2015	Rp129.258.132.763	Rp117.157.806.747	110,33
2016	Rp152.462.202.064	Rp141.627.624.400	107,65

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 (Data Diolah)

Berdasarkan data yang telah ditampilkan dalam Tabel 3, Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 menunjukkan penurunan setiap tahunnya. Namun, adanya penurunan tersebut tidak mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam menggunakan dana secara efektif dengan hasil perolehan rasio diatas <100%. Dengan hasil perhitungan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kota Mojokerto memiliki kinerja anggaran yang sangat efektif. Hal ini dapat diketahui dari terpenuhinya realisasi penerimaan PAD yang melebihi target yang telah di anggarakan.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar efisiensi dari berlangsungnya suatu program atau kegiatan pemerintah dengan membandingkan *input* yang digunakan dengan *output* yang dihasilkan. Kinerja pemerintah daerah dinilai efisien jika rasio efisiensinya mencapai kurang dari 1 (satu) atau 100%. Berikut ini merupakan perkembangan rasio efisiensi keuangan daerah Kota Mojokerto Tahun 2014-2016:

Tabel 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Total Realisasi Belanja Daerah	Total Realisasi Pendapatan Daerah	Rasio Efisiensi
2014	Rp631.979.414.509	Rp689.461.578.822	91,66
2015	Rp706.783.751.688	Rp717.544.079.472	98,50
2016	Rp944.717.143.505	Rp806.772.000.827	117,10

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 (Data Diolah)

Berdasarkan data yang telah ditampilkan dalam tabel 4, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Namun, adanya

peningkatan tersebut menunjukkan kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto kurang efisien atau masih buruk dalam melakukan pembelanjaan dengan hasil perolehan rasio antara 90% hingga 100%. Namun, adanya peningkatan tersebut menunjukkan Pemerintah Daerah Kota Mojokerto tidak efisien dalam melakukan pembelanjaan dengan hasil perolehan rasio >100%. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto untuk mendapatkan pendapatannya masih cukup besar.

4. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian belanja daerah menunjukkan bentuk pemerintah daerah dalam mengutamakan penyaluran penerimaan pada pembelanjaan daerah, baik belanja operasi maupun belanja modal secara optimal. Berikut ini merupakan perkembangan rasio keserasian belanja Kota Mojokerto Tahun 2014-2016:

Tabel 5. Rasio Keserasian Belanja Modal Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Keserasian
2014	Rp141.591.947.930	Rp631.979.414.509	22,40
2015	Rp135.968.848.096	Rp706.783.751.688	19,24
2016	Rp303.737.103.331	Rp944.717.143.505	32,15

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 (Data Diolah).

Tabel 6. Rasio Keserasian Belanja Operasi Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Belanja Operasi	Belanja Daerah	Rasio Keserasian
2014	Rp490.179.894.979	Rp631.979.414.509	77,60
2015	Rp570.792.277.142	Rp706.783.751.688	80,76
2016	Rp640.980.040.174	Rp944.717.143.505	67,85

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 (Data Diolah).

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah ditampilkan dalam Tabel 5 dan Tabel 6 Rasio Keserasian Belanja Modal dan Belanja Operasi Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dengan hasil perhitungan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa aktivitas belanja jika dilihat dari besarnya pengeluaran Pemerintah Daerah Kota Mojokerto lebih cenderung pada belanja operasi dibandingkan belanja modal. Kinerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam pengembangan sarana prasarana Kota Mojokerto cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pengeluaran untuk belanja operasional.

5. Rasio Pengelolaan Belanja

Rasio pengelolaan belanja menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam mengatur aktivitas belanja agar tidak melampaui total pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah. Berikut ini merupakan perkembangan rasio pengelolaan belanja Kota Mojokerto Tahun 2014-2016:

Tabel 7. Rasio Pengelolaan Belanja Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016

Tahun Anggaran	Total Pendapatan	Total Belanja	Rasio Pengelolaan Belanja
2014	Rp689.461.578.822	Rp631.979.414.509	109,10
2015	Rp717.544.079.472	Rp706.783.751.688	101,52

2016

Rp806.772.000.827

Rp944.717.143.505

85,40

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 (Data Diolah)

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang telah ditampilkan dalam Tabel 7, Rasio Pengelolaan Belanja Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2014-2016 terjadi penurunan setiap tahunnya. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil perhitungan sebelumnya adalah aktivitas belanja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto kurang sebanding dengan pendapatan yang diperoleh. Besarnya aktivitas belanja menunjukkan terjadinya defisit pada anggaran sehingga perlu dilakukan evaluasi kinerja untuk merencanakan kegiatan di tahun mendatang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kemandirian Keuangan Daerah Kota Mojokerto dapat dikategorikan sangat rendah dan termasuk pada pola hubungan instruktif yang artinya Pemerintah Daerah Kota Mojokerto belum mampu membiayai sendiri kegiatan pemerintahannya sehingga dominan masih menggunakan bantuan dana dari Pemerintah Pusat/Provinsi. Rasio Derajat Desentralisasi tergolong kurang mampu. Tingginya peran Pemerintah Pusat menandakan bahwa rendahnya partisipasi PAD Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam menyelenggarakan kegiatan otonomi daerah. Apabila dilihat dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah tergolong sangat efektif. Besarnya tingkat efektivitas menandakan pencapaian kegiatan atau program kerja Pemerintah Daerah Kota Mojokerto dalam merealisasikan PAD dari yang telah ditargetkan sebelumnya. Sedangkan apabila dilihat dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah tergolong tidak efisien. Tingginya tingkat efisiensi menandakan perhitungan alokasi pendanaan dalam membiayai kegiatan pemerintahan Kota Mojokerto kurang diperhatikan serta besarnya prioritas penganggaran, sehingga pencapaian target tidak berjalan optimal. Belanja daerah Kota Mojokerto menunjukkan adanya keserasian pada belanja operasi dibandingkan belanja modal yang dinilai kurang serasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan besarnya belanja operasi, khususnya pada belanja pegawai yang disebabkan adanya penambahan jumlah pegawai negeri sipil, sedangkan untuk pengembangan sarana prasarana kurang mendapatkan perhatian lebih. Rasio Pengelolaan Belanja dapat dikatakan defisit yang ditunjukkan dengan besarnya aktivitas belanja daerah pada tahun 2016 tersebut melebihi dari pendapatan yang diperoleh.

Pemerintah Daerah Kota Mojokerto semestinya lebih dapat meningkatkan PAD dengan menerapkan regulasi yang tepat, mengadakan sosialisasi tentang pentingnya membayar pajak dan retribusi pada masyarakat serta memberikan rincian jumlah pajak yang harus dibayarkan, karena tidak semua masyarakat mengetahui rincian yang harus dibayarkan. Pemberian *reward* atau *punishment* terhadap ketepatan membayar pajak dan retribusi yang diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat karena dengan pemungutan pajak dan retribusi yang optimal dapat membantu meminimalkan ketergantungan bantuan dari pemerintah pusat/provinsi. Selain itu, aparat pelaksanaan keuangan daerah memerlukan kreativitas dalam menggali sumber-sumber pembiayaan baru, dapat melalui program kerjasama pembiayaan dengan pihak swasta maupun program peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pendirian BUMD sektor potensial.

DAFTAR PUSTAKA

- Agwor, T. C., & Akani, F. N. (2017). Financial Accountability and Performance of Local Governments in Rivers State, Nigeria. *International Journal of Economics, Commerce and Management*, 5(10), 620–635.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Erlangga.
- Darise, N. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah : Akuntansi Sektor Publik*. PT Indeks.
- Dubnick, M. J., & Frederickson, H. G. (2011). *Accountable Governance: Problems and Promises*. M.E

Sharpe.

Fahmi, I. (2012). *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta.

Fidelius. (2013). Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado. *Jurnal EMBA*, 1(1), 2088–2096.

Halim, A. (2008). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.

Jumingan. (2006). *Analisis Laporan Keuangan*. Bumi Aksara.

Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. PT. Erlangga.

Rachim, A. (2015). *Barometer Keuangan Negara/Daerah* (1st ed.). ANDI.

Randa, F., & Tangke, P. (2015). Developing Accountability Model of Local Government Organization: From Managerial Accountability to Public Accountability (Naturalistic Study on Local Government Tana Toraja). *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 211, 665–672.

Rangkuti, F. (1997). *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

Tangkilisan, H. N. S. (2005). *Manajemen Publik*. Grasindo.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Timur. 2018. (<https://surabaya.bpk.go.id/?p=21741>)

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2017. (<http://www.kemendagri.go.id>)